

Jurnal Politika

Jurnal Pencerahan Politik untuk Demokrasi
Jurnal Empat Bulanan | Volume 1, No. 2 Agustus 2005

60 Tahun Indonesia Merdeka

**Nasionalisme Indonesia: dari Nasionalisme Lokal
ke Nasionalisme Kosmopolit?**
A. Eby Hara

**Nasionalisme Indonesia Tergugat,
Nasionalisme Aceh Menggugat**
Teuku Kemal Fasya

Papua Dalam 60 Tahun Indonesia Merdeka
M.A.L. Wanaha

**Koherensi dan Efektivitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Menurut Amandemen UUD 1945**
Aidul Fitriadi Azhari

Pembangunan Pertanian Indonesia Selama 60 Tahun
Bustanul Arifin

Wawancara

Soedarpo Sastrosatomo, Sayidiman Suryohadiprojo,
Budiman Sudjatmiko, Mustafa Kamal, Nurul Arifin,

Galeri Pendapat

Burhanuddin (JIL), Wahyuni Refi (GMNI), Heri Heryanto Azumi (PMII),
Emmanuel Josafat Tular (PMKRI), Ahmad Rofiq (IMM),
Kenly Poluan (GMKI), Hasanuddin (HMI)



ISSN 0216-9193

9 770216 919397

**JURNAL
POLITIKA**
Vol. 1 No. 2
Agustus 2005
ISSN 0216-9193

Akbar Tandjung Institute menerbitkan Jurnal berkala dengan nama **Jurnal Politika** untuk para praktisi politik, masyarakat peminat politik maupun pakar ilmu politik. **Jurnal Politika** ini diharapkan menjadi referensi dan bahan diskusi, tukar pikiran antar-pembacanya. Isi jurnal adalah artikel maupun penelitian mengenai masalah politik dalam negeri, pemerintahan, ekonomi politik, hubungan internasional dan berbagai aspek pendidikan politik dan demokrasi.

Susunan Redaksi

Dewan Redaksi:

Dr. Bahtiar Effendy
Dr. Burhan D. Magenda, M.A.
Prof. Dr. Hasjim Djalal
Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Dr. J. Kristiadi
Dr. Mohammad Noer
Prof. Dr. Salim Said

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab:
Ibrahim Ambong

Redaktur Eksekutif:
M. Alfian Alfian M

Anggota Redaksi:
Puji Wahono
Ahmad Doli Kurnia

Koordinator Usaha:
Agustian B. Prasetya

Alamat Redaksi :

Kantor Taman A9, Unit A5, Jl Mega Kuningan Lot 8-9,
Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 – Indonesia
Tlp. 62+21 5764148, Fax. 62+21 5764149

E-mail :

jurnalpolitika@akbartandjunginstitute.org
jurnalpolitika_ati@yahoo.com

NASKAH

Jurnal Politika mengundang penulis/pengamat politik, dan akan dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan- tulisan yang dimuat dalam **Jurnal Politika** sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis masing-masing.

Tulisan yang dikirim ke **Jurnal Politika** berkisar 6000 -10.000 kata atau 25-40 halaman kwarto, 2 spasi, dengan teknis standar jurnal ilmiah populer. Cantumkan nama lengkap, alamat, *curriculum vitae* penulis. Untuk tulisan yang dimuat disediakan honorarium yang sepantasnya.

Naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulisnya kalau disertai perangko secukupnya. Naskah juga dapat dikirim via email ke jurnalpolitika@akbartandjunginstitute.org atau jurnalpolitika_ati@yahoo.com

Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai dengan perangko secukupnya. Pengiriman tulisan hendaknya disertai disket. Redaksi **Jurnal Politika** dapat menyunting tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isi naskah.

Adapun ketentuan penulisan catatan kaki, mengikuti aturan sebagai berikut:

¹ Alfian, *Pembangunan Politik Setelah Terciptanya Kerangka Landasan Pembangunan Nasional*, Jurnal Ilmu Politik, No. 1 (1986): 37-47.

² Jeffrey E. Garten, *A Cold Peace: America, Japan, Germany and the Struggle for Supremacy*, New York: Times Book, 1992, hal. 37.

³ Affan Gafar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999, hal. 4.

LANGGANAN

Jurnal Politika terbit 3 kali setahun.

Biaya pengganti ongkos cetak Rp. 40.000,- per eksemplar atau Rp 120.000,- per tahun.

Ongkos kirim per edisi Jawa: Rp 7.500,- Luar Jawa Rp 15.000,-.

Daftar Isi

Pengantar Redaksi:	5
Kajian Utama:	
Nasionalisme Indonesia: Dari Nasionalisme Lokal ke Nasionalisme Kosmopolit. <i>A. Eby Hara</i>	7
Nasionalisme Indonesia Tergugat, Nasionalisme Aceh Menggugat <i>T. Kemal Fasya</i>	33
Papua Dalam 60 Tahun Indonesia merdeka (Suatu Kajian Akademis) <i>M.A.L. Wanaha</i>	61
Koherensi dan Efektivitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Amandemen UUD 1945 <i>Aidul Fitriciada Azhari</i>	97
Pembangunan Pertanian Indonesia Selama 60 Tahun <i>Bustanul Arifin</i>	105
Wawancara	
Pancasila Bukan Sesuatu yang Mati <i>Sayidiman Suryohadiprojo</i>	123
Pancasila Dasar Mengembangkan Nilai-Nilai Kejujuran <i>Sudarmo Sastrosatomo</i>	129

Partai Politik Tidak Boleh Melanggar Pancasila <i>Budiman Sudjatmiko</i>	133
Pancasila adalah Konsensus Kebangsaan <i>Mustafa Kamal</i>	140
Pancasila Harus Diinterpretasikan kembali <i>Nurul Arifin</i>	149
Galeri Pendapat Kaum Muda Bicara Pancasila	153
Tinjauan Buku Melecut Kebangkitan Bangsa-Bangsa Asia	172

Nasionalisme Indonesia

*Dari Nasionalisme Lokal ke Nasionalisme Kosmopolit?

A. Eby Hara

Nasionalisme Indonesia, setidaknya setelah 60 tahun proklamasi kemerdekaan, tidak lepas dari berbagai terpaan masalah. Secara eksternal globalisasi, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Apakah globalisasi merupakan ancaman bagi nasionalisme? Tulisan ini berupaya untuk mengupas bagaimana Nasionalisme Indonesia masa kini dan apa tantangannya ke depan.

Globalisasi sering dianggap mengancam nasionalisme. Ciri utama globalisasi yang menyebabkan makin pudarnya batas-batas nasional dipandang mempengaruhi kesetiaan orang pada negara atau nasionalisme. Orang semakin berfikir global dan melayani kepentingan ekonomi dan politik global daripada kepentingan nasional negaranya. Tetapi benarkah kesetiaan yang bergeser itu memang akan mempengaruhi pembelaan orang pada negaranya? Bisakah orang pada saat yang sama mempunyai dua atau lebih kesetiaan? Apakah yang terjadi kalau pada satu saat ada konflik kesetiaan pada diri seorang warga negara?

Sulit mendapatkan jawaban yang pasti atas pertanyaan-pertanyaan ini. Dulu solusinya adalah bahwa orang harus menempatkan kesetiaan utama pada negara sementara kesetiaan lain dibawahnya. Namun kini dalam prakteknya, seringkali sulit membedakan mana kepentingan utama dan mana yang sekunder karena semua bergantung pada konteks, keadaan dan visi seseorang.

A. Eby Hara MA. Ph.D.
adalah Dosen Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Universitas Negeri
Jember, dan Program
Officer di International
Center for Islam and
Pluralism (ICIP), Jakarta.

Tulisan ini karena itu mencoba mengkaji secara kritis apakah memang globalisasi dan nasionalisme penuh kontradiksi. Sebagai asumsi awal dapat dikatakan bahwa globalisasi bukanlah sesuatu yang mesti dikhawatirkan, bila tujuan awal berdirinya negara dalam konteks internasional diperhatikan. Globalisasi memang membawa dampak negatif terhadap nasionalisme, tetapi ia sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan harus dihadapi. Suatu pandangan positif perlu dikembangkan dengan menempatkan ancaman itu secara lebih luas pada dampaknya terhadap nilai-nilai yang bersifat global.

Lebih khusus lagi, sebuah pandangan positif seperti kosmopolitanisme yang berkaitan dengan krisis hubungan individu dengan negara akibat globalisasi perlu mendapat perhatian sebagai salah satu jalan keluar dilemma globalisasi versus nasionalisme. Kosmopolitanisme makin berkembang sejalan dengan kepentingan dan hak-hak individu dan ketidakmampuan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan di dalam negeri yang makin kompleks dan memang menghendaki campur tangan internasional. Dalam konteks ini nasionalisme dalam pengertian sempit hanya untuk mempertahankan kedaulatan harus menepi untuk memberi kesempatan pada semangat kosmopolitanisme untuk berkembang. Peran negara tetap penting seperti –dalam kasus

yang akan dibicarakan tulisan ini– untuk mencegah berkembangnya aktor-aktor transnasional yang destruktif terhadap nilai-nilai universal dalam kosmopolitanisme.

Untuk menguraikan pandangan di atas, paper ini dibagi dalam lima bagian. Bagian pertama akan membahas ketegangan antara nasionalisme dengan globalisme, yang memfokuskan pada bagaimana negara telah memperkuat kedaulatan lewat nasionalisme. Kemudian diuraikan bagaimana kosmopolitanisme bisa menjadi jalan tengah ketegangan tadi dengan melihat peran negara dalam konteks kosmopolitanisme.

Selanjutnya tulisan ini melihat bagaimana tahapan nasionalisme di Indonesia dan mencoba menjawab pertanyaan tentang tahap berikutnya dari nasionalisme Indonesia. Berikutnya, tulisan ini akan melihat lebih spesifik lagi peran negara dalam mengatasi terorisme dalam konteks kosmopolitanisme. Bagian terakhir adalah kesimpulan dari tulisan ini.

Konsolidasi Negara dan tantangan Globalisasi

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang kosmopolitanisme, tulisan ini ingin menguraikan lebih dahulu bagaimana muncul dan menguatnya prinsip kedaulatan dan nasionalisme di dunia ketiga dan kemudian bagaimana globalisasi telah

menggoyahkan sendi-sendi kedaulatan tersebut dan mengganti nasionalisme dengan kesetiaan lain. Perlu dicatat disini bahwa perkembangan nasionalisme yang semakin elitis semakin menempatkan konsep itu dalam taruhannya terutama karena tuntutan globalisasi yang menyebabkan kesetiaan terhadap negara menjadi berkurang.

Nasionalisme, kedaulatan dan negara adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ditangan elit para penguasa terutama di dunia ketiga, ketiga konsep itu saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Nasionalisme dianggap sebagai suatu kata kunci dan roh untuk mencapai kebebasan. Benedict Anderson menjelaskan bahwa nasyon atau bangsa adalah hasil dari imajinasi orang-orang yang membayangkan mereka berada dalam satu negara dan merasakan persamaan nasib serta mitos tentang masa lampau bersama yang jaya. Nasionalisme berkembang karena perkembangan teknologi media cetak yang menyebarkan kesadaran kebangsaan itu.¹

Nasionalisme kemudian meluas dan diterima sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh semua warga, dan bahkan sebagian orang menganggap lahirnya negara seper-

ti Indonesia sebagai berkah dan karunia dari Tuhan. Dalam kadar tertentu memang kemudian ada aspek religius dari tiap nasionalisme. Ketika awal perjuangan kemerdekaan sebagaimana masyarakat Muslim menganggap berjuang melawan penjajah adalah juga tugas agama dan jihad. Tetapi lebih dari itu kesadaran untuk rela berkorban dan mati sebagai *martyr* untuk Negara, adalah juga bersifat religius dalam pengertian religiusitas yang lebih luas. Dalam konteks ini membedakan nasionalisme sekuler dengan nasionalisme religius adalah suatu hal yang rancu.

Namun apapun cara pandang kita, bagaimana pun nasionalisme pada mulanya dan dalam beberapa perkembangannya di kemudian hari, nasionalisme adalah sebuah proyek elitis dari kalangan terdidik. Pada elit inilah yang melakukan konsolidasi nasionalisme dan kedaulatan. Pada mulanya nasionalisme digunakan untuk membakar semangat rakyat untuk merdeka dan bersatu. Kemudian setelah merdeka menjadi milik para penguasa untuk memperkuat bangsa dan Negara serta kadang-kadang untuk kepentingan pemerintahannya sendiri. Bila Negara sudah merdeka nasionalisme diperlukan untuk memperkuat kedaulatan dan untuk melindungi kedaulatan dari apa yang mereka sebut dengan 'ancaman intervensi asing'. Memang ciri utama nasionalisme seperti dikatakan oleh Nenad Miscevic menyangkut: (1) kepedulian terha-

¹ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London, Verso, 1983.

dap identitas nasional, dan (2) upaya untuk mencapai atau mempertahankan kedaulatan politik negara.²

Dalam konsolidasi nasionalisme, Negara dan kedaulatan ini, para elit penguasa mengklaim bahwa identitas Negara dianggap mutlak dan tidak dapat diganggu oleh negara lain dalam hal apapun. Di tangan para elit politik kedaulatan menjadi sangat dekat dengan nasionalisme dan harga diri bangsa. Ungkapan yang paling sering terdengar adalah kecaman terhadap bangsa dan Negara lain 'yang menginjak-injak harga diri bangsa'. Ini kemudian melahirkan pembelaan terhadap bangsa atau dengan kata lain memunculkan perasaan nasionalisme untuk menentang mereka yang menginjak kedaulatan bangsa itu. Kedaulatan dalam konteks ini juga dimaknai sebagai 'harga diri' bangsa.

Kedaulatan sering juga disamakan dengan keutuhan bangsa. Berdaulat berarti kita dapat mengontrol semua wilayah teritorial dari campur tangan asing dan dari gerakan separatisme di dalam negeri. Atas nama kedaulatan segala bentuk intervensi dan separatisme menjadi sah untuk dibasmi termasuk dengan kekuatan militer.

Dalam konteks ini, di tangan para penguasa politik, kedaulatan menjadi alat *sensitive* dan ampuh untuk

memobilisir massa dan mendorong nasionalisme. Penguasa rezim otoriter, menggunakan prinsip ini untuk menolak setiap campur tangan asing terhadap pemerintahan mereka terutama yang menyangkut masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Para penguasa ini berlandung di balik prinsip kedaulatan dan non-intervensi untuk melawan tekanan internasional ini.

Sehabis Perang Dingin, negara-negara dunia ketiga melakukan konsolidasi untuk melawan tekanan Barat dalam hal pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Kedaulatan mendapatkan signifikansi baru dalam konteks ini ketika negara-negara seperti Cina, Indonesia dan ASEAN bersatu melawan tekanan Barat terhadap apa yang mereka anggap campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka. Sebelum ini ASEAN sendiri dibentuk untuk membangun solidaritas yang kuat melalui prinsip saling menghormati dan tidak campur tangan pada urusan internal Negara anggota yang lain. Dengan terbentuknya ASEAN ancaman dan ambisi teritorial satu negara terhadap kedaulatan Negara lain menjadi reda dan diselesaikan dalam 'cara ASEAN' (*ASEAN way*).³

³ Dengan demikian ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang berbeda dengan Uni Eropa di mana, di sini justru mereka mentransfer sebagian kedaulatan untuk badan baru kerjasama regional yang dapat melayani kepentingan bersama mereka secara lebih baik.

² Nenad Miscevic, 'Nationalism', *Stanford Encyclopedia of Philosophy*

Perkembangan dalam praktek politik dunia ketiga ini menunjukkan bahwa *state*, nasionalisme, kedaulatan berkembang menjadi tiga konsep saling terkait berhubungan timbal balik secara erat satu sama lain tidak terpisahkan bahkan saling memperkuat satu sama lain. Kedaulatan menjadi kuat karena ada nasionalisme yang pada gilirannya akan memperkuat *state* dan pemerintahan yang sedang berkuasa. Sementara pemerintah menggunakan prinsip kedaulatan dan nasionalisme untuk kepentingan konsolidasi politik ke dalam dan juga ke luar. Eratnya hubungan antara ketiganya membuat ketiadaan salah satu dari prinsip itu akan melemahkan prinsip yang lainnya.

Tetapi dalam perkembangannya, bagaimanapun penguatan nasionalisme dan perasaan kebangsaan ini, tantangan dari luar semakin menguat. Era globalisasi telah memunculkan kepentingan-kepentingan baru dan juga artinya kesadaran baru. Dalam bidang ekonomi pengaruh globalisasi adalah paling nyata. Kesetiaan orang bukanlah pertama kali pada bangsa tapi kepada keuntungan atau uang. Sekarang muncul pandangan bahwa 'uang tidak mengenal nasionalisme'. Karena uang para pengusaha tidak peduli apakah Negara dan rakyatnya akan hancur. Dalam krisis keuangan di Indonesia misalnya, para pengusaha melarikan modal ke luar negeri, membiarkan pemerintahan hancur.

Demikian juga dalam bidang pendidikan, dalam hal lingkungan hidup, dan dalam masalah nilai-nilai, referensi orang adalah kepada nilai-nilai dan standar universal. Negara hanya menjadi semacam tidak lebih dari tempat tinggal atau tempat persinggahan. Sementara apakah orang bekerja, melakukan sesuatu dan mengabdikan, apakah untuk Negara atau kepentingan lain yang lebih luas tidak lagi menjadi persoalan.

Ketegangan terjadi ketika para elit penguasa merasakan kepentingan dan pengabdian dari warganya bertentangan dengan apa yang mereka anggap 'kepentingan bangsa yang biasanya didefinisikan dengan kepentingan kedaulatan dan persatuan bangsa'. Sebagai kelompok yang merasa menjadi pengawal persatuan dan kebangsaan, seringkali kelompok elit mengklaim sebagai pemilik kebenaran dan memberangus mereka yang dipandang mengancam persatuan.

Kelompok-kelompok swadaya masyarakat biasanya sering dianggap sebagai kelompok yang melayani kepentingan asing dan mengancam persatuan. Ketika kelompok non pemerintah ini berbicara hak-hak asasi manusia, pentingnya pemilihan yang jujur dan pemberantasan korupsi, dan hak-hak orang untuk mengeluarkan pendapat dan berbicara dan menentukan masa depannya sendiri yang kemudian ditunjukkan dengan pembelaan ter-

hadap kelompok-kelompok di daerah yang tertindas. Mereka dengan mudah dianggap melayani kepentingan asing yang ingin menghancurkan republik ini. Elit pemerintahan memiliki kata kunci untuk menentukan apa yang benar dan salah, dan kadangkala mereka mendapat dukungan yang luas dari kalangan elit lain yang mengklaim sebagai penguasa Negara dan nasionalisme.

Semakin kuat orang bersuara anti-separatisme, semakin keras sikap anda terhadap kelompok-kelompok "penentang republik", semakin berkoar-koar seseorang tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, maka semakin orang itu dianggap sebagai 'nasionalis tulen'.

Namun dalam arus globalisasi ini elit pemerintahan tidak bisa mengklaim kebenaran ini terus menerus. Mereka perlahan tergusur dan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan global kalau ingin bertahan.

Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap mereka yang didiskriminasi dan tertindas telah menjadi nilai global, walaupun kadangkala diiringi oleh kepentingan politik negara besar. Walaupun banyak orang menyadari kepentingan Barat dan ketidakadilan dalam berbagai isu di dunia, namun tekanan global akan penerapan hak-hak asasi itu merupakan realitas yang harus dihadapi oleh negara-negara yang masih otokratis.

Kosmopolitanisme sebagai Jalan Tengah

Bila kita melihat klaim tentang kedaulatan dan nasionalisme yang semakin tidak populer dalam konteks global, maka pertanyaannya adalah apakah *state* atau negara masih diperlukan. Lalu apa yang menjadi ciri kekhasan dan fungsi negara kalau memang ia masih diperlukan di masa-masa mendatang. Untuk menjawab hal ini agaknya kita perlu kembali kepada kajian klasik teori-teori politik tentang fungsi negara dan kedaulatan serta rohnya nasionalisme, sebelum kita membicarakan kontribusi faham kosmopolitanisme dalam masalah ini.

Dari uraian di atas, konsolidasi negara-negara dunia ketiga dalam perkembangan globalisasi sering mengabaikan esensi kedaulatan sebagaimana diungkapkan dalam teori kedaulatan klasik. Sebuah negara berdaulat kalau mereka sudah mengkonsolidasi diri, *sustainable* dan memang kuat. Kedaulatan demikian oleh Robert Jackson disebut dengan kedaulatan positif dalam pengertian negara itu punya kemampuan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu (*freedom to*), sementara negara yang di luar kategori ini hanya menggunakan jaminan hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan.⁴ Ne-

⁴ Robert H. Jackson, *Quasi-states: sovereignty, international relations, and the Third World* (New York: Cambridge University Press, 1990).

gara-negara seperti ini dianggap berdaulat secara pasif dan diistilahkan dengan *freedom from*. Mereka bebas dan berdaulat karena memang ada hukum internasional di dalam masyarakat internasional yang melindungi mereka dari ancaman intervensi.⁵

Nasionalisme seringkali menyematkan situasi ini karena sifatnya yang emosional dan kadang mem-babi buta. Namun dalam konteks ini nasionalisme menghadapi realitas tantangan yang sebenarnya tidak mungkin dilawan. Kalau Negara terus menerus lemah dan tak mampu memberi kesejahteraan pada rakyat, orang dengan sinis mulai mempertanyakan bahwa kita tidak bisa "makan" nasionalisme.

Bila kita membicarakan Negara, kedaulatan dan nasionalisme dalam konteks keterbatasannya ini maka pembicaraan terhadap kosmopolitanisme untuk mengatasi ketegangan antara globalisasi versus nasionalisme dan kedaulatan, menjadi tidak terelakkan. Berbeda dengan globalisasi yang merupakan fenomena eksternal yang mempengaruhi definisi dan pemaknaan tentang negara, kedaulatan dan nasionalisme para elit, maka kosmopolitanisme berangkat dari analisis teori politik yang dicoba untuk diperluas ke dalam politik internasional oleh beberapa penulis seperti Charles

Beitz⁶, Andrew Linklater⁷, Paul Keal⁸ dan beberapa penulis lainnya.

Berbeda dengan globalisasi yang memiliki makna negatif bagi golongan kiri seperti gerakan anti globalisasi, maka kosmopolitanisme memiliki makna yang lebih netral bila tidak dapat dikatakan positif. Pengikut paham ini meyakini adanya suatu nilai-nilai kemanusiaan universal yang merupakan hasil kesepakatan bersama mayoritas pendukung agama-agama, nilai-nilai dan budaya yang berbeda. Menurut kosmopolitanisme semua makhluk manusia, tanpa memandang afiliasi politik mereka, merupakan satu masyarakat bersama yang harus terus dihidupkan. Kemanusiaan yang universal ini bukan suatu yang mustahil karena perkembangan dunia sekarang yang tidak mengenal batas dunia dan karena ketidakmampuan Negara sendiri dalam mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dianggap 'internal' di Negara itu. Munculnya istilah demokrasi kosmopolitan dari David Held⁹ dan menguatnya tuntutan '*humanitarian intervention*' terhadap negara-ne-

⁶ Charles Beitz, *Political Theory and International Relations* (Princeton, NJ: Princeton University Press 1979).

⁷ Andrew Linklater, *Men and Citizens in the Theory of International Relations* (London: Macmillan, 1990).

⁸ Paul Keal, *Ethics and Foreign Policy* (Allen & Unwin and the ANU, 1992)

⁹ David Held, '*Cosmopolitan Democracy and the New International Order*', Ch 12 *Democracy and the Global Order* (Cambridge: Polity, 1995)

⁵ *ibid.*

gara yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, di kalangan negara anggota PBB, merupakan dua contoh menguatnya paham kosmopolitanisme.¹⁰

Secara mendasar esensi kosmopolitanisme berbeda dengan semangat tentang negara dalam definisi kalangan realis. Bagi para pendukung realis, *state me-desensitize* orang supaya tidak campur urusan Negara lain.¹¹ Dalam konteks Negara, perilaku negara mendapat pembenaran dari teori-teori realis dalam hubungan internasional yang mengasumsikan Negara sebagai aktor-aktor yang egois yang berdaulat dan mengejar kekuasaan untuk kekuasaan. Negara juga dilihat sebagai *single actor* yang utuh dan nampak tidak mempunyai masalah di dalamnya.

Pada pihak lain kosmopolitanisme mendorong orang untuk peduli akan nasib orang lain. Para pendukung paham ini percaya akan hu-

manisme universal yang merupakan sintesa dari berbagai nilai dan budaya di dunia. Setiap agama misalnya memiliki nilai universal yang diterima oleh pengikut agama lainnya. Gerakan-gerakan kosmopolitan muncul menjadi aktor internasional baru yang memperjuangkan etika global tentang hak-hak asasi, demokrasi, perang dan damai. Deklarasi PBB tentang HAM universal misalnya adalah salah satu contoh dari upaya demikian, demikian juga berbagai konvensi PBB tentang hak-hak wanita, anak-anak, suku terpencil, konservasi lingkungan dan lain-lain, berangkat dari asumsi akan adanya kemanusiaan universal yang harus dilindungi. Kepekaan internasional yang kuat terhadap penderitaan orang Aceh yang terkena bencana Tsunami adalah contoh konkrit aspek kosmopolitanisme yang kuat di dunia.

Dalam konteks kosmopolitanisme, kita berbicara tentang hal yang lebih konkrit daripada sekedar pengaruh globalisasi yang seringkali destruktif terhadap negara. Globalisasi bersifat menghancurkan dan seringkali menimbulkan respon reaktif yang bersifat kekhawatiran akan hilangnya identitas diri sebagai bangsa. Kosmopolitanisme tidak menolak globalisasi bahkan merupakan bagian dari proses globalisasi nilai-nilai.

Paham ini melihat ada solusi yang dapat dilakukan baik dalam konteks negara bangsa maupun da-

¹⁰ Para teoritis politik sejak awal memang mengkritik paham kedaulatan mutlak yang dilekatkan pada konsep kedaulatan. Filosof seperti Hugo Grotius, Alberico Gentili, dan Francisco Suarez misalnya mengakui kedaulatan Negara tetapi menurut mereka kedaulatan itu harus dibatasi. Di dunia internasional misalnya ada norma-norma internasional. Saat itu seorang pangeran yang kejam misalnya bisa mengalami tindakan penghukuman dari Negara-negara tetangga, suatu paham yang sama dengan prinsip intervensi kemanusiaan seperti sekarang. Dan Philpott, 'Sovereignty', dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003, <http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/> diakses 20 Juli 2005.

¹¹ Keal, *op. cit.*

lam konteks global.¹² Kosmopolitanisme mengkritik kegagalan negara bangsa untuk memenuhi janji kedaulatan sebagaimana dalam pengertian klasik untuk memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi warga, dan mencari solusi untuk masalah-masalah itu dalam level internasional.

Persoalan yang dihadapi negara bangsa seringkali berasal dari ketidakmampuan menciptakan negara yang kuat dan pemerintahan yang baik, namun kadangkala juga karena memang kapasitas negara tidak memungkinkan penyelesaiannya tanpa campur tangan internasional. Berkaitan dengan ketidakmampuan negara, banyak literatur yang telah membahas hal ini. Salah satunya adalah tiadanya *good governance* dan kegagalan menciptakan iklim demokrasi di Negara itu. Negara itu kadangkala terpuruk pada level yang menyedihkan seperti negara-negara di Afrika yang juga memerlukan campur tangan asing seperti *humanitarian intervention* atau bahkan intervensi militer untuk mengakhiri konflik bersenjata.

Karena kepedulian dan awal dari kosmopolitanisme adalah individu bukan *state*, maka kepedulian perta-

ma adalah pada hak-hak individu. Ini tidak berarti bahwa *state* ditolak keberadaannya oleh paham ini, melainkan diletakkan pada fungsinya untuk memenuhi hak-hak dan kesejahteraan individu. Bila *state* tidak mampu maka dimungkinkan adanya institusi internasional untuk membantu *state* mengatasi persoalan-persoalan dan kepentingan individu itu.

Tahapan Nasionalisme Indonesia

Mengapa kita perlu menguraikan tahapan nasionalisme di Indonesia? Ini berkaitan dengan perubahan yang signifikan tentang makna nasionalisme di Indonesia itu sendiri belakangan ini dan dalam kaitan dengan kosmopolitanisme. Pada mulanya nasionalisme Indonesia, dan juga mungkin di kebanyakan dunia ketiga lainnya, adalah bersifat elitis berasal dari kalangan terdidik. Namun kemudian menjadi kesadaran massa, bersifat transendental dan religius. Dalam perkembangannya ternyata aspek religius dan elitis nasionalisme ini berkurang, kalau tidak bisa dikatakan hilang. Masuknya Indonesia dalam jaringan internasional kapitalisme dan globalisasi telah melemahkan kemampuan elit untuk mendefinisikan nasionalisme versi mereka dan telah mengubah karakter nasionalisme Indonesia dari impian dan fanatisme buta pada identitas dan kedaulatan Indonesia,

¹² Lebih lanjut lihat Molly Cochran, 'Cosmopolitanism and communitarianism in a post-Cold War World', dalam John Macmillan and Andrew Linklater (eds.), *Boundaries in Question, New Directions in International Relations* (London: Pinter Publishers, 1995).

ke arah pembelaan dan kesetiaan pada nilai-nilai global.

Beberapa tulisan telah mencoba menulis nasionalisme di Indonesia. Di antaranya adalah Benedict Anderson yang menguraikan lahirnya nasionalisme Indonesia sejalan dengan perkembangan Kapitalisme terutama media cetak. Anderson juga melihat pentingnya peran elit dan pentingnya konsep yang disebut dengan *imagined community* untuk menjelaskan situasi perasaan nasionalisme dan kebangsaan yang melekat pada setiap anak bangsa Indonesia.¹³

Dalam perkembangannya nasionalisme Indonesia sering dibagi menjadi apa yang dikenal dengan nasionalisme sekuler dan religius.¹⁴ Nasionalisme sekuler sering dihubungkan dengan kelompok-kelompok non-agama terutama Islam yang punya pandangan kebangsaan berbeda dengan kelompok yang menghubungkan nasionalisme dengan religiusitas. Nasionalisme Indonesia belakangan juga sering disorot dari sisi asal usulnya. Beberapa kalangan Barat misalnya mempertanyakan kesahan wilayah se-

perti Timor Timur, Aceh dan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Mereka melihat secara etnis dan agama, yang dibuktikan dengan pemisahan Timor Timur, daerah-daerah itu tidak bisa menjadi wilayah Indonesia.

Salah satu kritik yang umum terhadap tulisan-tulisan di atas adalah bahwa pengalaman Barat sangat dominan dalam memahami nasionalisme di Indonesia. Di Barat memang nasionalisme tumbuh dari unsur etnisitas dan agama. Maka dari itu penulis seperti Anthony Smith dan John Hutchinson menulis tentang pentingnya perasaan etnisitas dalam pembentukan bangsa. Perasaan kesamaan etnis dan juga agama dianggap modal dasar bagi bertahannya suatu bangsa. Memang dalam prakteknya dapat dilihat pecahnya beberapa wilayah bekas Eropa Timur dan Uni Soviet, semuanya hampir mengikuti alur kesamaan etnis dan agama. Ini misalnya dimulai dari Ceko dan Slowakia, di Yugoslavia ada Bosnia dan Serbia, kemudian di bekas Uni Soviet ada Ukraina, Belarusia, Uzbekistan, Azerbaijan yang kesemuanya mengikuti alur kesamaan etnis dan/atau agama.

Namun dalam kasus Indonesia, elemen-elemen yang membentuk nasionalisme lebih luas daripada sekedar agama dan perasaan etnis. Nasionalisme yang bermula, seperti umumnya di kebanyakan Negara, dari kalangan elit mendapatkan tem-

¹³ Benedict Anderson, *Imagined Communities*, *op. cit.*

¹⁴ Lihat misalnya Mark Juergensmeyer, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State* (University of California Press, 1993). Buku ini berusaha melihat kemunculan aktivitas keagamaan dan perlawanannya terhadap modernitas sekuler.

pat di masyarakat dalam jaringan sosial mereka dan perasaan keter tindasan dan ketimpangan yang mereka alami. Kesadaran nasionalisme yang diperkenalkan oleh kalangan terdidik di Indonesia tumbuh karena perasaan tertindas yang memunculkan persamaan nasib di kalangan rakyat. Nasionalisme pada saat itu identik dengan semangat pembebasan dari ketertindasan dan lahirnya cita-cita tentang Indonesia sebagai bangsa dan negara yang terhormat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya.

Tulisan Anderson bahwa bangsa adalah hasil dari imajinasi dalam konteks ini juga perlu dilihat secara kritis. Imajinasi tentang bangsa dalam konsep Anderson tetaplah mengacu pada model bangsa-bangsa yang tersedia dalam pengalaman Barat. Pengalaman Barat itu menjadi semacam modul yang dapat dipilih oleh negara-negara dunia ketiga. Peranan para nasionalis untuk berkreasi sebagai subyek dalam kaca mata Anderson dengan demikian seperti dikatakan Partha Chatterjee diabaikan. Chatterjee lebih lanjut mengkritik bahwa bukan hanya kekayaan dunia ketiga dieksploitasi dan dijajah, imajinasi bangsa-bangsa ini juga selamanya dijajah. Ia mengatakan: *'Even our imaginations must remain forever colonized'*.¹⁵

¹⁵ Partha Chatterjee, *'Whose Imagined Community'*, dalam Gopal Balakrishnan (ed.), *Mapping the Nation* (London: Verso, 1999), hal. 216.

Klaim Chatterjee tidak hanya sebagai kritik akademik tetapi juga dapat ditunjukkan dalam realitas perkembangan nasionalisme di dunia ketiga termasuk di Indonesia. Berdasarkan kritik ini, kita bisa melihat nasionalisme Indonesia terutama pada awal terbentuknya sebagai nasionalisme yang tidak hanya mengikuti modul yang ada di Barat. Dalam perkembangan paling nyata arah nasionalisme itu yang mengikuti jalannya sendiri diperlihatkan dengan perdebatan yang kuat tentang bentuk negara dan arah politik luar negeri. Anak bangsa ini membayangkan sebuah model Negara integralistik dengan *reference* pada nilai-nilai tradisional tentang pandangan sentralistik kekuasaan Jawa. Sebagian juga membayangkan tentang model Negara Islam. Dalam politik luar negeri, pidato Bung Hatta yang sangat terkenal yang kemudian dirumuskan dalam kata-kata "mendayung antara dua karang" adalah sebuah imajinasi dan tuntutan untuk menjadi subyek yang berbeda dengan Barat di dunia internasional.

Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa konsep Anderson memang bisa menjelaskan tentang asal dan perkembangan nasionalisme namun seperti kata Chatterjee peran para nasionalis sebagai subyek lebih kompleks daripada sekedar mengikuti 'modul' tentang contoh nasionalisme di Barat. Kalau hanya sekedar mengikuti modul contoh di Barat tentu nasionalisme itu

tidak menemukan dukungan yang kuat dari kalangan akar rumput dengan semangat keindonesiaan yang mulai tumbuh.

Dinamika hubungan antarelit dengan rakyat, dan perbedaan tentang konsep nasionalisme itu sendiri di kalangan elit menunjukkan kompleksitas nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai subyek untuk menentukan masa depan sendiri. Kedekatan antara pemimpin dengan rakyat pada saat itu juga membantu perkembangan faham nasionalisme. Seperti dikatakan Bung Hatta bulan Oktober 1951:

"Ekonomi dan kebudayaan selalu berjalan bersama... Apabila kita mau membangun dalam berbagai lapangan ekonomi, maka kita berhadapan dengan berbagai soal, yang sebagian boleh dikatakan terletak dalam lapang kebudayaan. Selain soal pikiran dan ciptaan yang menjadi motor pembangunan ekonomi, kita hadapi juga soal-soal yang mengenai jiwa, perasaan, serta kebiasaan rakyat. Adakalanya berbagai hal yang kemudian ini menjadi halangan bagi aktivitas dalam pembangunan ekonomi... Sifat kultur ialah memelihara, memupuk. Barang-barang kultur yang dibangun dipupuk supaya subur tumbuhnya, untuk memberikan hidup yang lebih mulia kepada manusia".¹⁶

Nasionalisme mendapat tempat dengan cepat di kalangan rakyat karena sebelumnya di masyarakat me-

man sudah ada lembaga-lembaga dan nilai-nilai budaya dan agama yang di dalamnya antara lain berisi semangat persamaan dan keadilan. Hal ini misalnya tercermin dalam perdebatan nilai-nilai tentang nasionalisme antara Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soetatmo Soerjokoesoemo. Menurut penelitian Takashi Shiraisi, sebagaimana yang dilaporkan oleh Kurniawan:¹⁷

'Tjipto mendirikan Budi Utomo dan *Indische Partij*, sedang Soetatmo mendirikan Komite Nasionalisme Jawa. Debat itu diterbitkan tahun 1918 dalam bentuk selebaran berjudul *Javaansche of Indische Nationalisme*. Soetatmo memajukan nasionalisme Jawa yang dipandanginya lebih jelas dalam landasan bahasa dan kebudayaan untuk sebuah bangsa. Dalam cara pandang ini, Soetatmo mengusulkan peran pandito sebagai pencipta ketertiban dalam kekacauan pergerakan dengan memperbaiki hubungan *kawulo-gusti*, rakyat menjadi *kawulo sang pandito ratu*. Di seberangnya berdiri Tjipto dengan nasionalisme Hindia dengan penitisan jiwa *satrio sejati*, yaitu ke-luhuran moral, melalui perlawanan tanpa kompromi terhadap penindasan dan pemerasan Belanda para priyayi terhadap rakyat.'

¹⁶ Dikutip dalam Jakob Sumarjo, 'Nasionalisme Indonesia Baru Perspektif Budaya', *Pikiran Rakyat*, 11 Juli 2004.

¹⁷ Takashi Shiraisi "Satria" vs "Pandita", Sebuah Debat dalam Mencari Identitas", dalam Akira Nakazumi (editor), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang (Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, diambil dalam Kurniawan, 'Diskursus Nasionalisme: Artefak Masa Lalu di Panggung Masa Kini', http://www.geocities.com/z_iwan/catat-an_filsafat_artefak.html, diakses Juni 2005.

Kemampuan dan kearifan pemimpin untuk memelihara dan memupuk semangat kebangsaan telah menjadi kekuatan besar dari nasionalisme Indonesia. Dalam perdebatan itu pandangan tentang Indonesia yang lebih luas dan integratif mengalahkan pandangan lokal sebagaimana dicerminkan dalam lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.¹⁸ Proses perdebatan yang berangkat dari nilai dan kearifan lokal seperti ini membuat nasionalisme itu kemudian tumbuh subur di masyarakat. Penindasan, ketidaksejerajatan dan ketidakadilan agaknya merupakan kata kunci yang melahirkan perlawanan terhadap penjajahan dan munculnya aspirasi tentang sebuah Negara merdeka yang sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya. Bila nasionalisme di Barat terbatas pada etnisitas maka di Indonesia berbagai hal menjadi satu dalam membentuk nasionalisme. Karena itu nasionalisme Indonesia pada mulanya mengandung semua elemen perlawanan dari berbagai nilai. Nasionalisme ini sekaligus, dengan sendirinya, bersifat religius karena membela suatu keyakinan dan kerelaan untuk berkorban bahkan untuk mati demi membelanya.

Dalam pengertian religius seperti itu maka unsur religiusitas itu tidak terbatas di kalangan pejuang Muslim. Memang beberapa kalang-

an Islam memperjuangkan dan membela kemerdekaan yang diproklamasikan dikaitkan dengan konsep *Jihad* untuk membela kebenaran dan tanah air. Ini juga dicerminkan dari lasykar-lasykar di kalangan Muslim pada waktu itu. Namun semua unsur masyarakat pada waktu itu yang rela berkorban dan mati untuk bangsa, tentu berangkat dari suatu keyakinan religius bahwa kematian mereka adalah tidak sia-sia. Kata-kata "merdeka atau mati" bisa dimaknai sebuah kata-kata yang suci: merdeka dengan kejayaan dan harga diri; dan mati dengan kematian yang mulia, keyakinan bahwa Tuhan akan membalas perjuangan dan kematian itu dengan balasan yang setimpal.

Perkembangan di atas ini dapat dikatakan sebagai tahap pertama dari nasionalisme Indonesia. Tahap itu ditandai dengan tumbuhnya perasaan kebangsaan dan persamaan nasib yang diikuti dengan perlawanan terhadap penjajahan baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan.

Namun bagaimana tahap berikutnya dari nasionalisme Indonesia? Ide tentang nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler agaknya muncul setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Upaya dari kelompok Islam untuk mendirikan negara yang berlandaskan Islam dan kalangan nasionalis yang ingin mempertahankan negara sekuler berdasarkan Pancasila dijadikan patokan untuk menganalisis kesadaran ke-

¹⁸ Kurniawan, *ibid.*

bangsaan atau perasaan nasionalisme bangsa.¹⁹ Pandangan demikian berlanjut dan kadangkala telah menjadi asumsi umum yang diambilalih oleh masyarakat dalam menjelaskan nasionalisme Indonesia.

Pandangan demikian ini memiliki beberapa kelemahan serius. Pertama, pemilahan nasionalisme religius versus sekuler berdasarkan afiliasi politik berbagai kelompok politik dan partai di masyarakat adalah sebuah kesalahan akademik. Afiliasi politik lebih menyangkut pada cita-cita tentang model pemerintahan dan Negara dan tidak berkaitan dengan nasionalisme yang merupakan kecintaan terhadap negara dan bangsa yang lebih luas. Jadi membagi nasionalisme dalam kategori itu adalah penyederhanaan yang tidak tepat. Seperti dikatakan tadi, semua nasionalisme adalah religius sifat-

nya karena mesti ada unsur transendental di dalamnya.

Kedua, pembagian itu sebagai konsekuensinya mengacaukan analisis tentang nasionalisme Indonesia yang lebih luas. Ini menunjukkan seolah-olah ada cita-cita tentang negara dan bangsa yang lain di Indonesia. Nasionalisme Indonesia tumbuh karena perpaduan dari beberapa unsur yang diuraikan di atas termasuk nilai-nilai agama dan nilai-nilai lokal.

Ketiga, pembagian itu jelas sangat dipengaruhi oleh kacamata sempit di Barat yang melihat nasionalisme tumbuh pada mulanya karena kesadaran etnis atau agama. Kalau mengikuti pembagian demikian, perlawanan-perlawanan ke-daerahan untuk menuntut kemerdekaan seolah mendapat justifikasi. Pandangan itu seolah menjustifikasi adanya etnik-etnik atau agama tertentu yang berhak untuk mengklaim Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Orang misalnya bisa menyebut nasionalisme Timtim, nasionalisme Aceh, nasionalisme Islam, nasionalisme Kristen, dan sebagainya.

Dengan alasan ini untuk melihat tahap berikutnya dari nasionalisme Indonesia kita harus kembali kepada awal terbentuknya nasionalisme itu, yakni bahwa nasionalisme pertama kali adalah proyek elit yang kemudian diterima dan mengakar di masyarakat karena pranata sosial

¹⁹ Syamsudin Haris misalnya membagi perpolitikan Indonesia dalam katagori berikut. Haris memetakan 24 partai itu menjadi enam aliran ideologis, yaitu : 1). Islam, terdiri dari PBR, PBB, PKS, PPP dan Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia, 2). Nasionalis Religius, terdiri dari PKB dan PAN, 3). Nasionalis Sekuler, PDI-P, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, PNBK, PPD [Dimmy Haryanto], 4). Nasionalis Pragmatis, di antaranya Golkar, PKPB [R. Hartono], PKPI [Edi Sudrajat], Patriot Pancasila, Partai Demokrat dan PPD [Oesman Saptaj], 5). Sosialis Demokrasi, seperti PIB, Partai Merdeka [Adi Sasono], PBSB [Mochtar Pakpahan], PSI dan Partai PDK [Ryas Rasyid], 6). Kristen, Partai Damai Sejahtera [Ruyandi Hutasoit]. Lihat Dajafar Badjeber, 'Mengedepankan Islam Substantif' dalam http://www.pbr.or.id/text_isi.php?tab=kolom&nil=Mengedepankan%20Islam%20Substantif&nil1=Mengedepankan%20Islam%20Substantif, diakses Juli 2005.

dan nilai yang memang mendukung semangat nasionalisme itu. Aspek kedua adalah bahwa nasionalisme di manapun bersifat religius, karena itu pemilahan antara nasionalisme religius dan non religius dapat mengacaukan pengertian nasionalisme dan analisis.

Berdasarkan asumsi ini, bentuk nasionalisme Indonesia pada masa Orde Lama semasa Presiden Soekarno adalah kelanjutan dari semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan, dengan peran pemimpin nasional yang lebih besar. Nasionalisme itu mengandaikan adanya ancaman musuh dari luar terus menerus terhadap kemerdekaan Indonesia. Ancaman itu disebutkan berasal dari imperialisme dan kolonialisme dari negara-negara kapitalis dan kemudian negara-negara yang dimasukkan dalam *Old Established Forces (Oldefos)*. Ancaman itu kemudian ditunjukkan dari masih dikuasainya Irian Barat oleh Belanda dan terbentuknya Federasi Malaya sebagai bagian dari proyek imperialisme Barat. Kedua bentuk ancaman itu kemudian dihadapi dengan mobilisasi massa untuk membebaskan Irian Barat dan setelah itu kampanye ganyang Malaysia.

Dalam kajian politik, proyek nasionalisme Soekarno adalah proyek elitis. Nasionalisme digunakan untuk mengatasi berbagai konflik dan kesulitan yang dihadapi oleh negara baru merdeka. Konflik politik inter-

nal ditandai dengan rivalitas yang meningkat antara militer dan kalangan komunis diatasi dengan seruan untuk melawan ancaman dari luar. Masyarakat disodorkan dengan cita-cita dan bayangan tentang kegemilangan Indonesia untuk melupakan sementara persoalan riil yang dihadapi oleh bangsa dan negara seperti masalah ekonomi, pemerintahan dan pembangunan.

Seperti pada masa perlawanan terhadap penjajahan, proyek nasionalisme elitis ini masih mempunyai gema yang kuat di masyarakat. Kepiawaiannya Soekarno sebagai seorang *solidarity maker* dalam istilah Herbert Feith mempesona massa untuk bersatu, bahkan berlomba untuk menunjukkan perasaan nasionalisme mereka. Kondisi internasional ketegangan Timur-Barat dan masih tertindasnya banyak Negara di dunia ketiga oleh penjajahan menjadikan lahan subur bagi politik flamboyan Soekarno untuk bergema di dunia internasional. Ini menambah kredibilitas Indonesia di dunia internasional dan artinya kebanggaan bagi bangsa baru merdeka bernama Indonesia.

Hasilnya seperti nasionalisme pada masa revolusi, pada masa Soekarno, nasionalisme memiliki *appeal* yang sangat kuat dengan berbagai ritual tentang kejayaan masa lalu dan kebencian terhadap Barat. Masyarakat bahkan menganggap Soekarno sebagai Ratu Adil yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ke-

relaan berkorban yang muncul menunjukkan kuatnya aspek transendental dari nasionalisme ini. Nasionalisme pada masa Soekarno dengan demikian bersifat romantik.

Tahap selanjutnya dari nasionalisme di Indonesia adalah pada masa Orde Baru. Pada masa ini, memang Indonesia menjadi bagian dunia internasional dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang politik, para elit pemerintah tetaplah pemegang definisi nasionalisme. Nasionalisme agaknya resmi menjadi ideologi dan alat Negara untuk melawan dan mendeskreditkan mereka yang anti pemerintah baik terhadap ancaman yang dianggap datang dari dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri nasionalisme identik dengan persatuan dan kesatuan. Kelompok oposisi atau mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah disingkirkan karena akan mengancam persatuan dan stabilitas. Perbedaan diredam bukan dengan menyelesaikan pokok persoalannya tetapi ditindas dan disembunyikan dibawah karpet.

Terhadap luar negeri, nasionalisme berarti kedaulatan, integritas dan identitas bangsa. Tekanan agar ada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, demokrasi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai campur tangan asing terhadap kedaulatan RI. Nilai-nilai universal itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai bangsa atau demokrasi Pancasila

yang juga didefinisikan secara sepihak oleh penguasa Orde Baru. Untuk masalah kedaulatan ini, pada saat itu Indonesia berkoalisi dengan negara-negara yang memiliki masalah dengan hak-hak asasi manusia seperti beberapa Negara ASEAN dan Cina, untuk melawan apa yang disebut dengan campur tangan asing terhadap kedaulatan negara.

Jadi berbeda dengan tahap pertama nasionalisme atau pun dalam kadar tertentu dengan tahap kedua, nasionalisme telah kehilangan sama sekali ruh kemanusiaan untuk melawan penindasan. Nasionalisme murni didefinisikan oleh Negara tanpa ada konsultasi dan kesesuaian dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Masyarakatlah yang harus menyesuaikan dengan definisi nasionalisme negara bila ingin selamat dan mempunyai peran dalam Negara Orde Baru.

Namun agaknya upaya Negara Orde Baru ini tidak berjalan dengan mulus. Berlawanan dengan upaya Negara itu, nasionalisme mulai mengalami redefinisi di kalangan masyarakat sejalan dengan perubahan kebijakan pemerintahan yang mengintegrasikan Indonesia ke dalam dunia internasional dalam bidang ekonomi. Bila nilai-nilai dan kearifan lokal tertindas oleh mesin asimilasi budaya Orde Baru, kesadaran kemanusiaan sebagian masyarakat tetap terasah karena globalisasi dan informasi dan karena

keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dan politik internasional.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam sistem global internasional, perdebatan tentang nasionalisme di masa Orde Baru sampai sekarang menjadi sangat menarik. Definisi nasionalisme yang hanya mengambing aspek anti asing masih tetap kuat. Tetapi definisi ini agaknya dipandang semakin sempit dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Terdapat argumen bahwa Indonesia yang kuat secara ekonomi akan memperkuat kedaulatan bangsa dan akan membuat Indonesia sejajar dengan bangsa moderen lainnya. Kebanggaan akan bangsa dan negara akan kuat seiring dengan kuat dan modernnya negara dan bangsa Indonesia. Untuk tujuan itu mau tidak mau Indonesia harus bergabung dan mencontoh negara-negara yang sudah maju dan modern di dunia yakni negara-negara kapitalis Barat.

Karena itulah tidak mengherankan salah satu perdebatan tentang nasionalisme Indonesia sampai saat ini berputar pada soal nasionalisme ekonomi dan liberalisasi ekonomi Indonesia.²⁰ Kelompok nasionalis menuduh kalangan yang meliberalkan ekonomi Indonesia dengan menjual berbagai perusahaan ke pi-

hak asing, tidak nasionalis dan akan membuat Indonesia di bawah dominasi asing. Dalam pandangan ini, kita kehilangan kebebasan dan terpelempang pada kapitalisme. Bagian demi bagian negeri ini kemudian akan dikuasai oleh orang asing. Kedaulatan dan harga diri kita menjadi terinjak-injak.

Pada pihak lain beberapa kalangan lain terutama kalangan ekonom memandang liberalisasi ekonomi Indonesia adalah bagian tidak terelakkan dari globalisasi ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan nasionalisme dalam pengertian kelompok pertama. Bagi mereka, Indonesia harus menyesuaikan dengan tuntutan pasar internasional dan harus siap bersaing menghadapinya.

Kelompok terakhir ini secara eksplisit tidak pernah berbicara tentang nasionalisme. Tetapi apakah ini berarti mereka tidak nasionalis lagi? Dalam pengertian nasionalisme, chauvinisme ala Orde Lama, tentu saja mereka tidak nasionalis. Seiring dengan globalisasi dan tuntutan akan nilai-nilai global termasuk kapitalisme dan demokrasi, telah muncul generasi baru terutama di kalangan muda. Kelompok-kelompok generasi baru ini yang lahir karena modernisasi dan globalisasi kebijakan pembangunan Orde Baru, semakin membesar dan merupakan realitas yang agaknya perlu dipahami tersendiri dalam kaitan dengan nasionalisme.

²⁰ Revisond Baswir, 'Nasionalisme Ekonomi', *Republika*, 2 Juni 2003. Lihat juga, 'Menggagas Kedaulatan Individu', *Media Indonesia*, 26 Desember 2003.

Keterikatan mereka tidak lagi secara sempit pada tanah air Indonesia. Budaya mereka tidak lagi terutama budaya lokal tapi budaya Barat, musik dan film Barat, juga musik dan film India, kadang-kadang juga telenovela dari Amerika Latin. Mereka menikmati semua yang berbau "asing". Dalam bidang politik dan hak-hak asasi, mereka mengecam perlakuan sewenang-wenang terhadap kelompok yang dilabeli "separatis". Mereka berdagang dengan siapa saja tanpa mengenal batas negara.

Dengan kata lain sebenarnya kita sedang melihat tumbuhnya aktor-aktor dan anak-anak bangsa yang semakin kosmopolit. Mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai persaudaraan global dan universal. Mereka memiliki semangat patriotisme tetapi tidak terbatas pada membela negara tetapi juga membela kepentingan individu dan manusia yang lebih luas. Negara adalah penting sebagai tempat tinggal, seperti tempat lahir yang dirindukan untuk berkumpul dan bergurau,²¹ tetapi cara berpikir dan pembelaan mereka adalah pada kemanusiaan global.

Kecenderungan ini tidak terjadi hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Di mana-mana orang mem-

bela Aung San Syu-Kyi sebagai pejuang kebebasan di Myanmar dan membenci George Bush, Presiden AS yang suka perang. Seluruh masyarakat dunia peduli dengan penderitaan rakyat Aceh karena bencana Tsunami. Bantuan datang dari berbagai kalangan masyarakat sampai pada anak-anak sekolah. Patriotisme mereka melewati batas Negara, yaitu pada kemanusiaan universal.

Di Indonesia, negara sentralistik, terkontrol dengan satu definisi nasionalisme tidak mampu mengatur semua daerah sehingga harus memberikan otonomi pada daerah-daerah. Ini artinya memberikan kesempatan kepada aktor-aktor di daerah secara langsung untuk menjadi aktor kosmopolit. Ini memudahkan mereka menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Seperti pada masa Jalan Sutera yang juga melewati kawasan Nusantara, sebuah dunia kosmopolitan terbentuk karena perdagangan tapi bisa juga menjadi jaringan sistem intelektual dan agama dengan wilayah-wilayah lain. Nusantara sebetulnya terutamanya mereka yang tinggal di pesisir, karena posisinya geografis yang strategis dan masyarakatnya yang dinamik, sejak lama sebenarnya adalah masyarakat kosmopolit.

Dalam konteks dan kecenderungan global ini, semakin banyak orang membayangkan menjadi warga dunia (*world citizen*) dan terikat pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itu lah nilai-nilai dan

²¹ Arief Budiman, "Nasionalisme Rentan Terhadap Manipulasi", wawancara *Tempo Interaktif*, <http://www.tempointeraktif.com/harian/wawancara/waw-ariefbudiman01.html>, diakses Juni 2005.

semangat generasi Baru produk modernisasi dan globalisasi sekarang tidak dapat dipahami dalam pengertian lama nasionalisme, yaitu cinta dan pembelaan kepada tanah air secara total bahkan transendental. Nilai-nilai, semangat dan patriotisme mereka mestinya dipahami dalam semangat pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan global. Tentu saja tidak semua nilai-nilai global kondusif untuk menciptakan nilai-nilai kemanusiaan global. Tidak semua kelompok generasi itu mengusung perjuangan untuk menegakkan universalisme nilai kemanusiaan. Mesti dibedakan di sini misalnya gaya hidup Barat dengan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia dan etika dalam kapitalisme. Yang dimaksud adalah nilai-nilai universal yang disebut terakhir ini.

Nasionalisme dalam pengertian sempit dan klasik peninggalan Negara Orde Baru di atas berada dalam keadaan kocar kacir (*disarray*) dan dengan demikian harus diredefinisi. Nasionalisme Negara Orde Baru terasa sempit karena melihat segala sesuatu yang di sekitar negeri ini penuh dengan ancaman. Refleksi dari pandangan sempit tentang nasionalisme misalnya dapat dilihat dalam kutipan berikut:

"Cobalah baca fiksi-fiksi Indonesia mutakhir, khususnya setelah 1990-an. Cobalah simak puisi-puisi anak-anak muda kita sekarang. Cobalah saksamai sine-tron-sinetron yang bergentayang-

an di televisi kita. Cobalah dengar teriakan anak-anak muda di jalanan. Adakah sesuatu yang disebut nasionalisme Indonesia diperjuangkan? Adakah yang disebut nasionalisme menjadi sesuatu yang penting? Maaf, dengan berbesar hati dan berlapang dada, harus saya katakan, ternyata tidak. Tidak ada itu nasionalisme Indonesia.... Nasionalisme dalam pengertian identitas kebangsaan sungguh menjadi dekaden, dan sangat mungkin tidak diperlukan lagi.²²

Agaknya sulit mengharapkan atau memaksa generasi sekarang dan akan datang di Indonesia untuk berteriak "merdeka atau mati" karena zaman telah berubah dan musim telah berganti.

Namun sayangnya definisi *mainstream* tentang nasionalisme, seperti dikatakan oleh Santoso masih berpandangan bahwa nasionalisme adalah terutama anti-penjajahan atau anti-ancaman kekuatan asing. Walaupun ancaman asing untuk mengoyak kedaulatan Indonesia tidak konkrit, rezim Orde Baru, misalnya, tetap membuatnya nyata dalam wacana persatuan. Seperti dikatakan di muka nasionalisme itu direduksi dalam kaca mata kedaulatan bangsa dan negara, menjaga batas negara, mengamankan negara dari ancaman dari luar dan dari dalam. Nilai-nilai universal demokrasi dan hak-hak asasi bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan

²² Alfitra Salamm, 'Biarlah Nasionalisme Keindonesiaan Punah', *Media Indonesia*, 28 Oktober 2004.

identitas negara. Negara atau kelompok yang melakukan itu dianggap sebagai campur tangan asing.

Jika tidak diredefinisi, maka nasionalisme ini akan terlihat –seperti dikatakan oleh Aboepriyadi Santoso, sebagai nasionalisme *mashocistis* yang serba takut, suatu nasionalisme *schizofrenia* dan *xenophobia*.²³ Reaksi terhadap segala permasalahan bangsa pun terasa brutal. Santoso memberikan contoh tentang hal ini:

“Lihat misalnya reaksi kekerasan tentara di Timor Timur ketika mereka harus hengkang September tahun 99, kekagetan dan trauma publik ketika kita kehilangan pulau pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002, kesembarangan Jakarta dengan memaksakan pemekaran Papua dengan semangat *divide et impera* tahun 2003 dan tengok pula jingoisme, semangat yang terbakar dalam kasus perairan Ambalat Maret lalu, dan lain-lain.”

Sudah saatnya nasionalisme yang kehilangan akar nilai-nilai kearifan lokal ini diredefinisi. Dengan kecenderungan globalisasi atau lebih tepatnya menguatkan gerakan kosmopolitanisme di dunia internasional, nasionalisme Indonesia akan menemukan bentuk baru yang manusiawi.

Kosmopolitanisme dan Ancaman Terorisme

Salah satu persoalan empirik yang relevan berkaitan dengan nasionalisme dan kosmopolitanisme adalah masalah terorisme global yang marak dalam beberapa tahun belakangan ini. Dalam konteks kosmopolitanisme, terorisme adalah ancaman bagi nilai-nilai kemanusiaan universal tentang perdamaian dan larangan untuk membunuh orang tidak berdosa. Perjuangan melawan terorisme karena itu mestinya menjadi tanggung jawab semua orang sebagai suatu etika bersama. Dengan sendirinya upaya mengatasinya memerlukan kerjasama internasional tanpa memandang batas-batas negara, apalagi mengingat kemampuan *state* yang terbatas untuk mengatasi ancaman terorisme yang berskala global tanpa mengenai batas Negara. Namun harus juga diingat bahwa akar terorisme seperti pada kasus Indonesia muncul pada mulanya antara lain karena kegagalan negara untuk mengakomodasi berbagai pandangan yang berkembang dalam masyarakat melalui sistem pluralis, demokratis dan terbuka.

Kelompok-kelompok teroris di Indonesia misalnya seperti dalam kajian *International Crisis Group* Indonesia yang dipimpin Sydney Jones mempunyai kaitan dengan apa yang ia sebut dengan ring Banten. Mereka yang terlibat dengan

²³ Aboepriyadi Santoso, 'Haus Perang? Apa Latar Belakangnya', Radio Nederland Wereldomroep, 10 June 2005, http://www2.nw.nl/rnw/id/topikhangat/kolom_ranesi/kolom_santoso050610?view=Standard

Tabel

Isu-isu, Ciri-ciri dan Tahap-tahap Nasionalisme Indonesia

Isu/Periode	Pra/awal kemerdekaan	Masa Soekarno	Masa Soeharto	Pasca Orde Baru
Proses pendefinisian nasionalisme	Bersama	Negara	Negara	Bersama
Hubungan elit-massa	Dialog elit-massa	Pemimpin dominan	Dominasi negara	Dialog global elit-massa
Hubungan dengan kedaulatan	Tanah air diperjuangkan	Tanah air diperjuangkan	Menjaga kedaulatan	Tanah air sebagai bagian dari dunia
Tema-tema dalam nasionalisme	Kesederajatan, kebebasan universal	Harga diri bangsa, anti imperialisme dan anti kolonialisme	Melawan campur tangan asing; ancaman terhadap pesatuan dan kedaulatan	Kemanusiaan universal
Sifat	Revolusioner-humanistik	Revolusioner-romantik	<i>Xenophobic-Developmentalist</i>	Humanistik-kosmopolit

pemboman di depan Kedubes Australia menurutnya mempunyai orangtua atau hubungan dengan mereka yang pernah terlibat gerakan Darul Islam yang memberontak terhadap RI di masa Orde lama. Demikian juga beberapa tokoh yang kini dipenjara seperti Abu Bakar Basyir bersama almarhum Abdullah Sungkar adalah tokoh yang melawan rezim otoriter Soeharto. Pada masa Suharto juga muncul kelompok-kelompok radikal lain seperti Komando Jihad dibawah Ismail Pranoto tahun 1970-80-an dan Dewan Revolusioner Islam Indonesia di bawah Imam Muhammad Zein yang ingin mendirikan Negara Islam. Demikian juga sebuah gerakan melawan pemerintah pada tahun 1978 muncul

di bawah pimpinan Abdul Qadir Jailani.²⁴

Mereka ini semua pada saat itu bukan saja tidak bisa menyalurkan pandangan mereka secara terbuka dalam suatu sistem demokratis yang menghargai perbedaan pendapat, tetapi lebih jauh lagi tidak mendapat tempat dalam sistem politik Indonesia yang totaliter pada masa itu. Sebagian dari mereka kemudian hidup dalam suasana revolusioner dan radikal yang menganggap dunia di luar bermusuhan dan ancaman bagi identitas dan keyakinan me-

²⁴ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 10.

reka. Sebagian dari cara hidup demikian bukan mustahil diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketika Indonesia sudah berganti dengan sistem yang lebih demokratis, maka suasana revolusioner itu dialihkan kepada ancaman lebih luas terhadap identitas dan cita-cita mereka dalam konteks global.

Dalam beberapa analisis suasana revolusioner ini terus menemukan tempatnya dalam lingkungan perang seperti di Afghanistan. Kamp-kamp perlawanan ini, lingkungan dan jaringan tempat mereka hidup mengasah mereka untuk melihat dunia yang terus bermusuhan dan memantapkan keyakinan bahwa perjuangan tiada akhir untuk melawan ancaman itu adalah tugas suci agama. Keyakinan yang kuat dan *cosmology* tentang dunia yang tercipta seperti itu menjelaskan beberapa bom bunuh diri yang dilakukan untuk tujuan yang mereka yakini.

Globalisasi memainkan peranan penting dalam proses menguatnya kekuatan-kekuatan teroris internasional ini. Teknologi informasi dan transportasi yang mengglobal memudahkan mereka untuk berkomunikasi, menyebarkan ideologi dan merancang kegiatan. Globalisasi juga membawa nilai-nilai yang berlawanan dengan kepentingan mereka dan membuat mereka terasing. Informasi tentang perilaku politik negara-negara Barat yang mudah didapat, dimaknai sebagai ancaman te-

rus menerus terhadap identitas mereka.

Kekuatan terorisme dengan demikian tidak dapat difahami hanya dalam konteks Negara. Mereka mungkin asalnya dari suatu Negara yang karena tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi, mereka memberontak terhadap negara. Tetapi dalam perkembangannya mereka menjadi kekuatan transnasional baik yang terorganisir rapi maupun yang kurang terorganisir. Ideologi mereka jelas bukan nasionalisme atau kesetiaan pada bangsa tetapi bisa saja semacam Islamisme yang sangat spesifik versi mereka.

Penafsiran mereka tentang ajaran agama dan perilaku mereka tentu saja destruktif terhadap upaya kaum kosmopolitanisme untuk mengembangkan suatu nilai kemanusiaan universal. Harus diakui bahwa mereka berhasil membawa pemahaman mereka yang spesifik tentang Islam ke dunia internasional dan menjadikannya satu ideologi transnasional.

Namun etika tentang perang dan damai yang dikembangkan bertentangan dengan etika global yang berkembang tentang misalnya *just war* (perang yang adil). Pemahaman mereka juga bertolak belakang dengan berbagai penafsiran tentang perang dan *jihad* yang pernah dikembangkan oleh Nabi Muhammad yang sangat defensif dan terbatas (Hashmi 2003).

Dalam konteks melawan terorisme, nasionalisme dan kedaulatan menjadi tidak relevan. Peran Negara tentu saja masih ada dalam mengatasi soal terorisme di dalam negeri namun kekuatannya sangat terbatas karena jaringan internasional kekuatan itu. Para teroris dengan bebas bisa melakukan kegiatan lintas batas di negara lain. Karena itu tugas lain negara yang tidak kalah pentingnya adalah membantu membangun suatu kesadaran universal tentang ancaman terorisme terhadap kemanusiaan. Di dalam negeri pemerintah harus menciptakan dan memelihara suasana dan iklim demokratis di mana ide-ide harus dikonteskan di dalam masyarakat. Ide-ide itu memerlukan penyaluran dan kelayakannya mesti diuji dalam suatu argumen yang rasional di dalam masyarakat.

Dalam konteks membangun kesadaran nilai anti terorisme, tidak semua negara tentu saja secara sukarela memperjuangkan kesadaran kemanusiaan ini. Kesadaran ini sering ditunggangi untuk kepentingan politik dari negara-negara besar untuk mempertahankan dominasi politik seperti di Timur Tengah lewat Israel dan ekonomi dengan menguasai Negara seperti Irak. Cara demikian juga tidak konstruktif untuk membangun nilai kemanusiaan universal karena bertentangan dengan etika perang dan damai bahkan yang telah disepakati oleh PBB. Tanpa ada kesadaran tentang penting-

nya etika perang dan damai bersama yang universal, sulit untuk membangun koalisi anti terorisme yang kuat.

Kesimpulan

Nasionalisme sampai sekarang dipandang sebagai sesuai yang positif dan harus didukung. Namun tulisan ini menunjukkan bahwa nasionalisme kadang-kadang hanya melayani kepentingan sekelompok elit saja. Berangkat dari asumsi bahwa nasionalisme pada mulanya adalah gerakan elit dan kalangan terpelajar, tulisan ini melihat bahwa dalam perkembangannya, nasionalisme di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan elit dan negara. Kadangkala nasionalisme itu kehilangan sentuhan pada nilai-nilai dan kearifan lokal berbeda dengan tahap awal bagaimana nasionalisme itu tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia pra dan beberapa waktu setelah kemerdekaan.

Pengaruh globalisasi atau lebih tepatnya nilai-nilai kosmopolitanisme menyadarkan kembali akan pentingnya aspek kemanusiaan dari nasionalisme yang menjadi tumpul karena dominasi Negara yang begitu lama terhadap masyarakat sipil di Indonesia. Generasi yang muncul akibat pembangunan dan modernisasi di Indonesia adalah generasi kosmopolit. Mereka berbicara tentang ide-ide kemanusiaan dan hak-hak individu yang tidak memandang

batas negara. Bagi mereka nasionalisme jelas bukan dalam pengertian klasik membela negara.

Kalau tidak untuk membela negara lalu seperti apakah nasionalisme mereka, atau mereka tidak memiliki nasionalisme lagi. Nasionalisme telah berkembang menjadi sebuah istilah yang berbeda tergantung siapa yang memegangnya. Namun bila dilihat semangat dan makna nasionalisme awal Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan, nasionalisme itu sangat kosmopolit. Nasionalisme waktu itu semangatnya universal dan juga melewati batas-batas Negara. Perjuangan kebebasan melawan penindasan dan tuntutan kesederajatan adalah hal yang sangat universal.

Jadi kalau masih ada nasionalisme pada saat ini, maka nasionalisme itu haruslah nasionalisme yang kosmopolit. Dalam nasionalisme kosmopolit, peran negara dan nasionalisme mengalami transformasi. Negara tidak lagi bisa mengklaim kedaulatan mutlak untuk mengatasi berbagai masalah. Dalam mengatasi masalah terorisme misalnya, yang menjadi salah satu kasus tulisan ini, negara bukan saja harus menyerahkan sebagian kedaulatan untuk

bekerjasama dengan dunia internasional tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melawan terorisme yang melanggar nilai-nilai universal kemanusiaan. Dalam konteks ini terorisme dipandang sebagai ancaman global terhadap kemanusiaan yang universal terutama terhadap etika universal tentang perang dan damai.

Cara pandang nasionalisme kosmopolit juga bisa dikembangkan untuk mengatasi kegagalan pemerintah di negara-negara dunia ketiga dalam menciptakan *good governance*. Institusi internasional bisa mengambil alih peran tersebut. Bahkan dalam banyak kasus negara-negara yang kuat sekalipun, negara-negara itu semakin tidak mampu mengatasi persoalannya sendiri. Ini tentu saja topik lain di luar tulisan ini yang menarik untuk dibicarakan. Namun pada intinya kita dapat mengatakan bahwa globalisasi tidak mesti bertentangan dengan nasionalisme. Dalam hal-hal tertentu seperti diuraikan di atas, kesetiaan orang tidak mesti hanya pada negaranya, suatu kemanusiaan yang universal kadangkala lebih penting daripada sekedar nasionalisme sempit. ♦

Daftar Pustaka

- 'Menggagas Kedaulatan Individu', *Media Indonesia*, 26 Desember 2003.
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1983).
- Badjeber, Djafar, 'Mengedepankan Islam Substantif' dalam http://www.pbr.or.id/text_isi.php?tab=kolom&nil=Mengedepankan%20Islam%20Substantif&nil1=Mengedepankan%20Islam%20Substantif, diakses Juli 2005.
- Baswir, Revisond, 'Nasionalisme Ekonomi', *Republika*, 2 Juni 2003.
- Beitz, Charles, *Political Theory and International Relations* (Princeton, NJ: Princeton University Press 1979).
- Budiman, Arief, "Nasionalisme Rentan Terhadap Manipulasi", wawancara *Tempo Interaktif*, <http://www.tempointeraktif.com/harian/wawancara/wawariefbudiman01.html>, diakses Juni 2005.
- Chatterjee, Partha, 'Whose Imagined Community', dalam Gopal Balakrishnan (ed.), *Mapping the Nation* (London: Verso, 1999).
- Cochran, Molly, 'Cosmopolitanism and communitarianism in a post-Cold War World', dalam John Macmillan and Andrew Linklater (eds.), *Boundaries in Question, New Directions in International Relations* (London: Pinter Publishers, 1995).
- Held, David, 'Cosmopolitan Democracy and the New International Order', Ch 12 *Democracy and the Global Order* (Cambridge: Polity, 1995).
- Jackson, Robert H., *Quasi-states: sovereignty, international relations, and the Third World* (New York: Cambridge University Press, 1990).
- Juergensmeyer, Mark, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State* (University of California Press, 1993).
- Keal, Paul, *Ethics and Foreign Policy* (Canberra: Allen & Unwin and the ANU, 1992).
- Kurniawan, 'Diskursus Nasionalisme: Artefak Masa Lalu di Panggung Masa Kini', http://www.geocities.com/z_iwan/catatan_filsafat_artefak.html, diakses Juni 2005.
- Linklater, Andrew, *Men and Citizens in the Theory of International Relations* (London: Macmillan, 1990).
- Miscevic, Nenad, 'Nationalism', *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003.
- Philpott, Dan, 'Sovereignty', dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2003, <http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/> diakses 20 Juli 2005.
- Salamm, Alfitra, 'Biarlah Nasionalisme Keindonesiaan Punah', *Media Indonesia*, 28 Oktober 2004.♦